BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasan Al-Banna lahir pada tahun 1906 di Mesir ia lahir dilingkungan yang islami. Orang tuanya adalah seorang ulama yang terkemuka ketika itu. Hasan Al-Banna juga adalah seorang pendiri Jama'ah Ikhwanul Muslimin dan Peminpin pertama Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini berdiri di kota Ismailiyah pada bulan Djul Qai'dah 1347 H. Pembentukan gerakan ini dilakukan setelah pertemuannya dengan enam tokoh lainnya, diantaranya adalah Hafidz Abdul Hamid, Ahmad Al-Hashari, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz, dan Zaki Al-Maghribi.[1] Di rumah Hasan Al-Banna lah pembentukan ini dilakukan dan mereka saling membai'at satu sama lain untuk hidup bersaudara, beramal untuk Islam dan berjihad dijalan-Nya. [2]

Tujuan dan cita-citanya yang luhur yakni untuk menegakkan prinsip-prinsip keislaman dimuka bumi ini, yaitu dengan beberapa tahapan yang harus dilaluinya sampai kepada tahapan negara. yakni dimulai dari diri sendiri untuk selalu memperbaiki diri sendiri, membina rumah tangga yang

---

[1] Hasan Al-Banna, *Memoar Hasan Al-Banna*, (terj) Salafuddin, Hewin Murtadho (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), p.106

[2] Husain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin, Telaah Sistem Jama'ah Dalam Gerakan* Islam (Jakarta: Robbani Press, 2001), p.328

islami, membina masyarakat muslim, membebaskan negeri dari setiap penguasa asing, memperbaiki pemerintahan, mengembalikan eksistensi internasional bagi umat Islam dan menjadi guru dunia dengan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjurunya. [3]

Ikhwanul Muslimin adalah gerakan yang menyeluruh yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ia disebut-sebut sebagai Dakwah Salafiyah, sebab ia mengajak pada sumber atau petunjuk kehidupan yaitu kembali pada al-Qur'an (kalamullah) dan as-sunnah, Thariqah Sunniyah, yang mewajibkan diri mereka senantiasa mengamalkan sunnah yang suci dalam segala hal, ia juga menbentuk club Olah Raga sebab mereka tahu mu'min yang kuat lebih baik dari pada mu'min yang lemah, dan seluruh beban yang diberikan Islam tidak mungkin dapat dijalankan dengan baik oleh orang yang lemah kecuali orang-orang yang kuat. Dan Allah pun lebih menyukai orang-orang yang kuat. Ia juga selalu mengutamakan pendidikan, ilmiah, sebab Islam menjadikan mencari ilmu adalah sebagai sebuah kewajiban yang harus dicari dan digali oleh setiap manusia dari buaian sampai ke liang lahat dan seseorang tidak akan berkembang dan memiliki pengetahuan jika tidak mencari ilmu, menggali dan mengamalkannya. ia juga termasuk lembaga ekonomi, sebab mereka tahu Islam sangat memperhatikan pengelolaan harta

[3] Ali Jabir, Menuju Jama'atul . . ., p.343

benda dan upaya mendapatkannya serta memudahkan untuk sarana pergerakannya guna kesejahteraan dan kepentingan umat. Dan ia juga memikirkan masalah sosial sebab mereka sangat memperhatikan masalah masyarakat sekitar dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapinya dan Islam pun menyuruh untuk membina hubungan yang baik dengan sesamanya bukan hanya sekedar dengan Tuhanya saja. Dan ia juga Termasuk sebagai lembaga politik sebab mereka menuntut perbaikan pemerintahan dan upaya menegakan khilafah.[4]

Semangat dan kepiawaian berpolitik pun telah dimiliki Hasan Al-Banna, seperti yang diungkapkan oleh Robert Jackson yang mengatakan bahwa "Terkumpul dalam dirinya kecerdasan politik, kekuatan peminpin, hujjah para ulama, keimanan kaum sufi, ketajaman analisa para ahli matematika, semangat atlet, analogi kaum filsafat, kepiawaian para orator, dan tulisan yang sistematis".[5] Keahlian politiknya pun telah diperlihatkannya semenjak Hasan Al-Banna masih duduk dibangku sekolah, ia mengambil peran dalam segala gerakan politik. Ia disebut sebagai seorang politisi yang Islami, memperhatikan masalah-masalah masyarakat, melawan penjajahan inggris yang berusaha merampas tanah, kekayaan, harkat dan martabat dari rakyatnya, ia berjuang demi

---

[4] Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan, Ikhwanul Muslimin 1* (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2012), p.356

[5] Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqh Politik, Hasan Al-Banna* (Jakarta: Robbani Press, 2012), p.4

mendapatkan kebebasaan, kemerdekaan dan menegakkan syariat Islam.[6] Beberapa kali ia memimpin demonstrasi dan pemogokan demi melawan penjajah Inggris di Mesir, menyelenggarakan beberapa kali muktamar politik dengan bermacam-macam tema guna mendiskusikan masalah-masalah atau gejolak politik, melakukan penyadaran politik, dan memberikan pengaruh pada peristiwa-peristiwa politik di Mesir, Misalnya pada tanggal 2 Mei 1946 Hasan al-Banna menyelenggarakan pertemuan lembaga-lembaga pendiri untuk melakukan pencabutan hak-hak rakyat Mesir yang dirampas, melakukan aksi-aksi nyata yang berupa demonstrasi dan long march ke istana Abidin yang merupakan tempat tinggal Raja Farouq, jatuhnya kabinet An-Nikrasy, pada tanggal 10 Mei dan 8 Juni mengkordinasi dua kali pembentukan massal untuk menegaskan tuntutan yang sebelumnya, pada tanggal 2 september 1946 terjadi pembantaian Koubri Abbas, melakukan Demonstrasi, pengusiran Inggris dari Mesir dan penyatuann lembah Nil pada masa pemerintahan Ismail Shidqi.[7]

Dari berbagai kontribusi, gerakan dan pemikiran Hasan Al-Banna yang begitu banyak dan memberikan pengaruh yang luar biasa didunia politik, dan cita-citanya guna menegakkan politik yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu Islam yang syamil (menyeluruh) yang tidak memisahkan

---

[6] Ishaq, *Fiqh Politik* . . ., p.175
[7] Ishaq, *Fiqh Politik* . . ., p.179

antara agama dan politik sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan analisa lebih jauh lagi tentang pemikiran politik Hasan Al-Banna

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan agama dengan politik menurut Hasan Al-Banna?
2. Bagaimana pemikiran politik Hasan Al-Banna?
3. Bagaimana pengaruh pemikiran politik Hasan Al-Banna terhadap Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari dan menelaah sisi lain dari kehidupan Hasan Al-Banna terutama dalam kehidupan politiknya. Jadi spesifikasi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan agama dengan politik Hasan Al-Banna
2. Untuk mengetahui dan paham pemikiran politik Hasan Al-Banna
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pemikiran Hasan Al-Banna

B. Kerangka Pemikiran

Kata politik berasal dari bahasa latin yaitu “politicus” dan bahasa Yunani “politicos”, dan “polis” (kota) artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), jika politik dikaitkan dengan ilmu, politik dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Kenegaraan (tentang sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan mengenai pemerintah atau terhadap negara lain (kebijaksanaan atau siasat), dan kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Secara umum, politik didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sistem Negara, baik yang menyangkut proses menentukan ataupun melaksanakan tujuan dari sistem-sistem yang ada.[8] berikut beberapa teori politik Barat dan Islam diantaranya adalah:

1. Teori-Teori Politik Barat

   Pandangan politik Barat sejatinya mewarisi pemikiran filsafat Yunani dan Romawi (Hellenisme) yang tercermin dalam pandangan hidup mereka yang sangat mengagungkan cita-cita kebebasan, optimisme, sekularisme, pengagungan terhadap jasmani dan akal serta sangat mengultuskan individu. Pandangan hidup ini juga

[8] Ahmad Dzakrin, *Tarbiyah Siyasiyah: Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah* (Solo: Era AdiCitra, 2011), p.3

terefleksikan dalam tr disi keagamaan Yunani dan Romawi Kuno yang memandang bahwa agama sepenuhnya bersifat duniawi (Mundane), praktis dan harus mengabdi kepada kepentingan manusia.[9] Seperti yang diungkapkan oleh Montesqueiu yang dikenal dengan istilah "Triaspolitika" yakni memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemikiran ini lahir dari upaya desaklarisasi kekuasaan ketuhanan yang absolute (the divine right of king) yang didapatkan raja dan bangsawan pada saat itu. kekuasaan menurutnya harus bersumber dari rakyat bukan dari Tuhan dan kebebasaan politik tidak bisa diperoleh dari kekuasaan yang sewenang-wenang.[10]

2. Teori-Teori Politik Islam

Kata politik dalam bahasa arab dapat disebut dengan As-Siyasah. As-Siyasah dalam pengertian bahasa diartikan sebagai pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan.[11] Sedangkan menurut istilah kata As-Siyasah As-Syariyyah (politik syari'ah) mengandung banyak makna, diantaranya adalah segala upaya untuk

---

[9] Dzakrin, *Tarbiyah Siasiyah . . ., p.6*

[10] Dzakrin, *Tarbiyah Siasiyah . . ., p.12*

[11] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Politik Islam:panduan Syariat Bagi Pemimpin dan yang Dipimpin,* (terj) Ajmal Arif (Jakarta:Griya Ilmu, 2017), p.13

memperhatikakan urusan kaum Muslimin, dengan jalan menghilangkan kezaliman penguasa dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka.[12] Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengungkapkan bahwa "wajib diketahui bahwa mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh Bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepeminpinan. Nabi Saw. bersabda: "Jika keluar tiga orang untuk bersafar maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin" (H.R. Abu Daud). Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan amar makruf nahi mungkar, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, mengadakan shalah ied, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud."[13]

---

[12] Dzakrin, *Tarbiyah Siasiyah . . ., p.16*

[13] Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syariyyah: Etika Politik Islam* , (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), p.168

1. Begitupun dengan Hasan Al-Banna yang membagi pengertian politik kedalam dua pengertian, yaitu Politik Internal dan politik Eksternal. Pertama, Politik Internal yaitu yang memiliki makna seperti mengatur roda pemerintahan, menjelaskan tugas-tugas pemerintah dan rakyatnya, merinci hak-hak dan kewajiban pemerintah dan rakyatnya, mengontrol dan membantu para petinggi agar mereka ditaati jika berbuat baik dan benar, dan diluruskan jika berbuat yang tidak baik atau menyimpang.[14] Kedua, Politik Eksternal yaitu menjaga kebebasan dari imperialisme dan campur tangan bangsa lain, menjaga kemerdekaan umat, menanamkan rasa percaya diri, kewibawaan, meniti jalan menuju sasaran-sasaran yang mulia menuju kedudukan yang tinggi dikalangan bangsa-bangsa lain, menetapkan pola interaksi bilateral maupun multilateral yang menjamin hak-hak rakyatnya, dan menegakkan hukum Internasional, yaitu yang mengarahkan semua negara menuju perdamaian internasional.[15]

---

[14] Al-Banna, *Risalah Pergerakan, 1* . . ., p.359
[15] Al-Banna, *Risalah Pergerakan, 1* . . ., p.365

Sedangkan unsur-unsur politik adalah makna yang terkandung pada pengertian politik itu sendiri, yaitu:

a. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi sah yang ditaati oleh rakyatnya. Begitupun para ilmuan yang menekankan Negara sebagai inti dari politik dan memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraannya. Seperti Roger F. Saltou dalam bukunya yang berjudul "An Introduction to Politics" menjelaskan bahwa "Ilmu politik mempelajari negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan yang dirumuskan, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan dengan negara-negara yang lainnya."

b. Kekuasaan

Menurut Miriam Budiharjo, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku tersebut. Dalam pandangan ini, semua kegiatan politik yang dilakukan berpangkal kepada dinamika didalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan

rakyat baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. W.A Robson dalam "The University Teaching of Sciences" mendefinisikan ilmu politik sebagai "Ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan."

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan pengambilan keputusan kolektif atau pembentukan kebijakan untuk masyarakat secara keseluruhan baik yang menyangkut urusan masyarakat maupun kebutuhan masyarakat yang menyangkut tujuan masyarakat itu sendiri.

d. Kebijakan Masyarakat

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan maupun cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Hoogerwerf dalam bukunya yang berjudul "Politicologie: Begrippen en Problemen" berpendapat bahwa "tujuan politik adalah membangun masyarakat secara terarah berdasarkan wewenang kekuasaan yang didapatkannya."[16]

---

[16] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), p.20

e. Pembagian

Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan atau dimiliki, sesuatu yang memiliki harga, penilaian, kejujuran, kebebasan berpendapat sampai pada nilai yang bersifat material seperti kekayaan, rumah dan hal lainnya. Seperti Harold Laswell dalam "Who Gets What, When and How" mengatakan bahwa politik adalah masalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana mendapatkannya. Sedangkan David Easton dalam "A System Analysis of Political Life" menjelaskan bahwa sistem politik adalah "keseluruhan interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoriter untuk dan atas nama masyarakat."[17]

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitaif dengan pendekatan library research dan deskriptif analitif.

---

[17] Budiardjo, *Dasar-Dasar* . . ., p.21

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji konsep Hasan Al-Banna adalah *Majmu'ah Rasa'ilil* Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Risalah pergerakan (Majmu'atu Rasail) 1 Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna terjemah Anis Matta, Risalah pergerakan 2 Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna terjemah Anis Matta, dan Mudzakkiratud Da'wah Wad Da'iyah (Memoar Hasan Al-Banna: untuk dakwah dan para Da'inya) terjemah Salafuddin dan Hawin Murtadho.

Sumber sekunder yang digunakan oleh penulis adalah Fiqh Negara Yusuf Al-Qaradhawi, Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir "Menuju Jama'atul Muslimin", Abdullah Qasim Al-Wasyli, "Syarah Ushul Isrin: Menyelami Samudra 20 Prinsip Hasan Al-Banna, Fiqh Politik Hasan Al-Banna, Ahmad Dzakirin "Tarbiyah Siyasiyah: Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah", Mushthafa Masyhur "Fiqh Dakwah", Fathi Osman "Ikhwan dan Democracy: Ikhwanul Muslimin Membedah Demokrasi", Anis Matta "Partai Keadilan Sejahtera" dan Zabir Rizq "Hasan Al-Banna: Dai, Murabbi, dan Pemimpin yang mengabdi, serta Asep Syamsul M. Romli,

"Demonologi Islam: Upaya Barat membasmi kekuatan Islam"

3. Teknik pengelolaan data

Dalam pengelolaan teknik data ini, penulis berusaha mengelola dan menyaring serta mengutip data yang berhubungan erat dengan pembahasaan diatas, terutama buku-buku yang membahas tentang politik Hasan Al-Banna. Dalam pengelolaan data tersebut penulis menggunakan metode interpretatif, yang dilakukan dengan mengambil data, menganalisisnya serta memberikan interpretasi terhadap data-data tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan.

4. Analisis data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan komparatif, yaitu:

a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data khusus yang dijadikan sebuah kesimpulan yang bersifat umum.
b. Komparatif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk kemudian dijadikan sebuah analisa yang bersifat khusus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka sistematika yang penulis susun sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas biografi Hasan Al-Banna, riwayat hidup Hasan Al-Banna dan karya-karya Hasan Al-Banna.

Bab ketiga, berisi pemikiran tentang hubungan agama dan politik Hasan Al-Banna; yang mencangkup tentang kesatuan agama dan politik, dan uraian tentang pengertian politik internal dan politik eksternal menurut Hasan Al-Banna.

Bab keempat, merupakan pembahasan pengaruh pemikiran politik Hasan Al-Banna; yang berpengaruh pada gerakan ikhwanul muslimin, partai keadilan sejahtera dan analisis yang mencangkup kekurangan dan kelebihan politik Hasan Al-Banna.

Bab kelima, bab yang memuat beberapa poin kesimpulan dan saran-saran.

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis mencantumkan daftar pustaka yang dijadikan sebagai sumber data penulis bagi pmbahasan tentang “ Pemikiran Politik Hasan Al-Banna”.